

ABSTRAK

PENGATURAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh:

M. HAFIS REFORMASI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang Persetujuan penghindaran pajak berganda, penghindaran pajak, serta pergeseran laba (P3B). Pengaturan terhadap negara yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak penghasilan atas transaksi elektronik (pajak digital). Aturan pajak internasional ini mengatur mengenai penghindaran pajak serta pergeseran laba yang termuat di dalam *multilateral instrument on tax treaty* tentang konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi ini, dengan mengesahkan peraturan presiden nomor 77 tahun 2019. Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang cipta kerja di bidang pajak penghasilan serta Peraturan Menteri keuangan nomor 18 / Pmk.03/2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang cipta kerja di bidang pajak penghasilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer yaitu MLI (*Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting*), bahan hukum sekunder Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang nomor 7 tahun 2021 serta Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2019 serta bahan hukum tersier yakni jurnal hukum internasional. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilalui dengan proses pengumpulan dan penyajian data. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa *Multilateral instrument* merupakan perjanjian internasional mengenai P3B, penghindaran pajak dan pergeseran laba yang sama kedudukannya dengan P3B (*tax treaty*) sehingga keduanya memiliki kedudukan yang setara. *Multilateral instrument* tidak menggantikan P3B yang lama namun memodifikasi pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, namun apabila pasal-pasal P3B yang tidak diubah melalui *multilateral instrument* akan tetap berlaku. Saran penulis dalam penelitian ini kepada negara-negara anggota G20 perlunya meratifikasi aturan baru mengenai pajak internasional berupa *multilateral Instrument* karena terbentuknya *multilateral instrument* merupakan pengajuan dari negara G20 serta untuk mempertimbangkan kepastian hukum mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional yang dapat menggerus basis pemajakan negara-negara yang tergabung dalam G20.

Kata Kunci: Multilateral Instrument, Penghindaran Pajak, Pergeseran Laba, P3B

ABSTRAK**MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING ARRANGEMENTS AND THEIR IMPLEMENTATION IN INDONESIA***By***M. HAFIS REFORMASI**

This study to describe and analyze the arrangements regarding double taxation avoidance agreement, tax avoidance, and profit shifting (P3B). Regulations against countries that intentionally do not pay income tax on electronic transactions (digital tax). This international tax rule regulates tax avoidance and profit shifts contained in the multilateral instrument on tax treaty concerning multilateral conventions to implement actions related to double taxation avoidance agreements to prevent erosion of the taxation base and shifting profits. Indonesia itself has ratified this convention, by ratifying presidential regulation number 77 of 2019. Law number 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations. Employment copyright law in the field of income tax and Minister of Finance Regulation number 18 / Pmk.03/2021 concerning regulations for implementing work copyright laws in the field of income tax. The type of research used in this thesis is normative research, using a statute approach, using three legal materials, namely primary legal materials, namely MLI (Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting), secondary legal materials for the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2021 and Presidential Regulation No. 77 of 2019 as well as tertiary legal materials, namely international law journals. The data collection method used in this research is literature study, the data obtained are then analyzed and presented in the form of descriptive sentences. The normative juridical approach is the approach used in this research, which is followed by the process of collecting and presenting data. The results of the research in this thesis indicate that the Multilateral instrument is an international agreement regarding tax treaties, tax avoidance and profit shifts that are equal in position to tax treaties (tax treaty) so that both have an equal position. The multilateral instrument does not replace the old P3B but modifies articles that are no longer relevant to the times, but if the P3B articles are not amended through multilateral instruments, they will remain in effect. The author's suggestion in this study to G20 member countries is the need to ratify new rules regarding international taxes in the form of a multilateral instrument because the formation of a multilateral instrument is a proposal from G20 countries and to consider legal certainty regarding tax avoidance by multinational companies that can erode the taxation base of countries who are members of the G20.

Keywords: Multilateral Instrument, Tax Avoidance, Profit Shift, P3B